

**2020**

**LKjIP**

**(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

**DINAS SOSIAL  
KOTA BLITAR  
Jl. Jawa No. 64 Blitar**

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho-Nya semata telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan kegiatan selama kurun waktu tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Untuk itu saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa-masa mendatang, disertai harapan semoga LKjIP ini bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Blitar, 26 Februari 2021

KERALA DINAS SOSIAL  
KOTA BLITAR



**Drs. Ee PRYO Istanto**

Pemimpin Utama Muda

NIPT 19620118 199003 1 009

**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**(Executive Summary)**

**A. LATAR BELAKANG**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2020 mengacu pada Rencana Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2020.

**B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Guna menjawab isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Blitar lima tahun kedepan, maka ditetapkan kinerja utama dan indikator kinerja utama yang kemudian diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
		Persentase fakir miskin yang mandiri	10%

### C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN/KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja sasaran strategis yang didukung kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja tiap-tiap kinerja utama pada tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1%	-7,31%	-731,00%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90%	92,30%	102,56%
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100,00%
	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	18,18%	181,80%

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2020, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 24.434.942.859,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.000.068.398,00 dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 21.434.874.461,00. Anggaran belanja langsung tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu belanja langsung program dan kegiatan teknis guna pencapaian kinerja Perangkat Daerah dan belanja langsung untuk mendukung program dan kegiatan kesekretariatan. Adapun anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan teknis sebesar Rp. 20.483.638.350,00 dengan realisasi Rp. 20.096.269.225,00 atau 98,11% dengan rincian per Kinerja Utama sebagai berikut :

NO	SASARAN/ KINERJA UTAMA	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	-831,00%	17.823.573.700,-	17.493.879.375,-	98,15%	-9,47
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	102,56%	845.666.150,-	824.412.750,-	97,49%	1,05
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	140,90%	1.814.398.500,-	1.777.977.100,-	97,99%	1,44

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C Maksud dan Tujuan.....	5
D Dasar Hukum.....	5
E Aspek-aspek Strategis.....	6
F Isu Strategis .....	7

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A Rencana Strategis .....	9
B Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	10

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	11
B Akuntabilitas Keuangan .....	20

### **BAB IV PENUTUP**

A Kesimpulan .....	23
B Langkah Perbaikan .....	23

### **LAMPIRAN**

1. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2016 – 2021
2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan kinerja dipergunakan sebagai :

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);



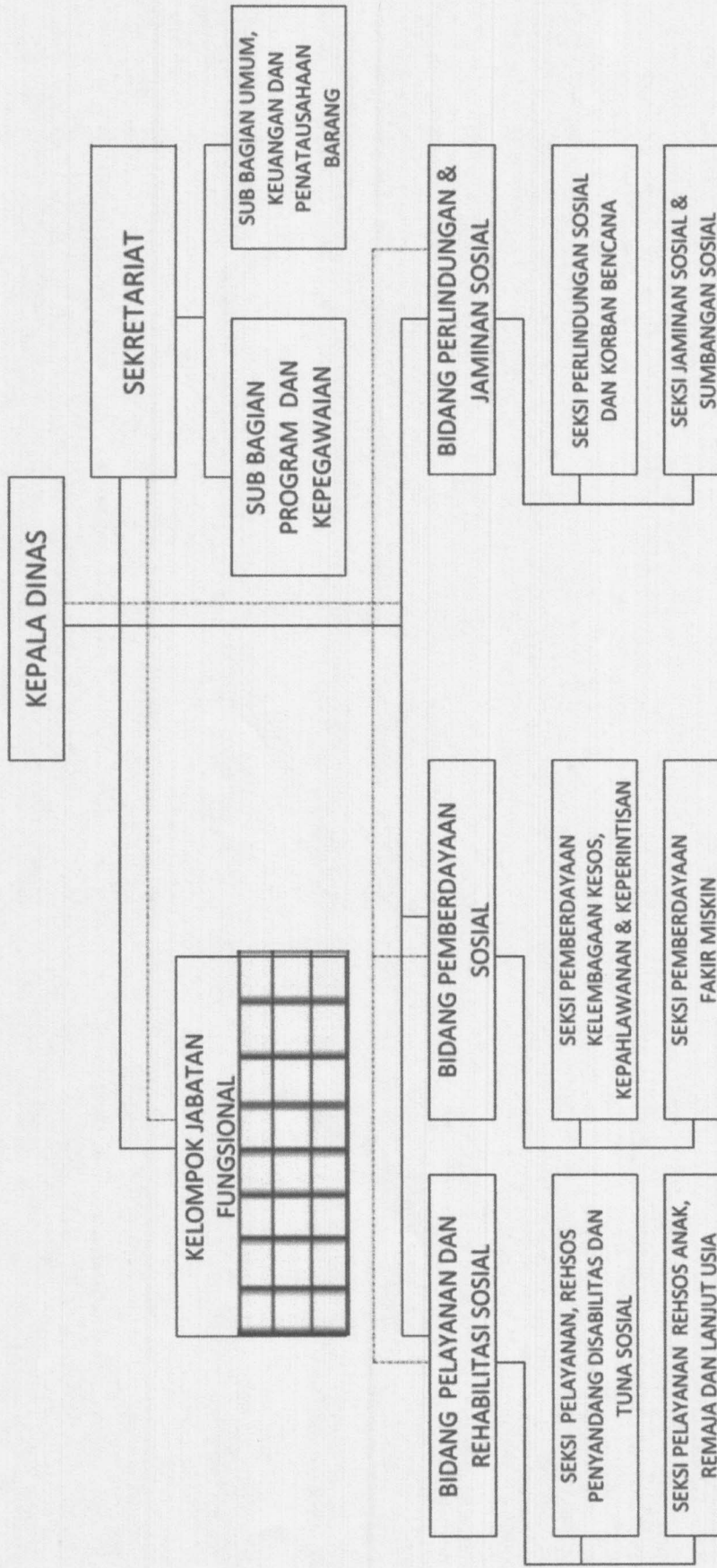
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.
6. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
7. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, struktur organisasi sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**



Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Tugas pokok

Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. penyelenggaraan urusan administrasi bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- f. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- h. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- i. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Estándar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- k. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- m. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

- n. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kota Blitar atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas Sosial kota Blitar dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2019.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Walikota Blitar atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh pimpinan.

### **D. Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Blitar ini disusun berdasarkan :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. Aspek – Aspek Strategis**

Sebagai dinas yang menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Dinas Sosial melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD 2016 – 2021. Arah strategis dan kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial di Kota Blitar seperti tertuang dalam misi ke 3 Kota Blitar yaitu “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan” yang memiliki tujuan meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat.

Upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak boleh menjadi hal marginal dan dianggap tidak penting dalam upaya meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Karena itu, penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan lebih berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu usaha penanganan kesejahteraan PMKS dilakukan untuk mengatasi masalah sosial dalam rangka menciptakan suatu tatanan kehidupan yang aman, tenteram, dan damai.

#### **F. Isu Strategis**

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Proses pemenuhan kesejahteraan sosial ini akan selalu menjadi tantangan karena masih banyak terdapat masalah-masalah yang berakitan dengan dan akan terus tumbuhnya komponen-komponen masyarakat yang menjadi sasaran upaya pemenuhan kesejahteraan sosial ini, yaitu mereka yang dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan terus dilakukan dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Isu-isu strategis di bidang sosial saat ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi;
2. Kemandirian dan produktifitas penyandang disabilitas masih rendah;
3. Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kurang maksimal;
4. Terbatasnya sarana prasarana/tempat untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penetapan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Blitar yang merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Blitar sebagai berikut :

Visi RPJMD	Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021		
Misi RPJMD	Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Meningkatkan kemandirian PMKS	Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Optimalisasi kerja sama dengan OPD terkait serta partisipasi sosial masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait	Peningkatan pelayanan PMKS dengan melibatkan daya dukung seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dan lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Meningkatkan kemandirian fakir miskin dan optimalisasi peran PSKS	Memperkuat ekonomi keluarga fakir miskin dan pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat dan lembaga dalam pelayanan kesejahteraan sosial



Adapun matrik Renstra Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2016 – 2021 secara lengkap tertuang pada lampiran I LKjIP ini.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 maka Dinas Sosial Kota Blitar menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan perubahan sesuai dengan pedoman baru yang memuat sasaran strategis berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2020 sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar ) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90%
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN**

Dinas Sosial Kota Blitar telah menetapkan 3 Sasaran Strategis/Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2020. Capaian Kinerja Utama selama Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

**1. Sasaran I : Meningkatnya kesejahteraan PMKS**

**Indikator : Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Pencapaian sasaran ini dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1.1**  
**Pencapaian Kinerja 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian Kinerja
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,00%	-7,31%	-831%

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan 2020**

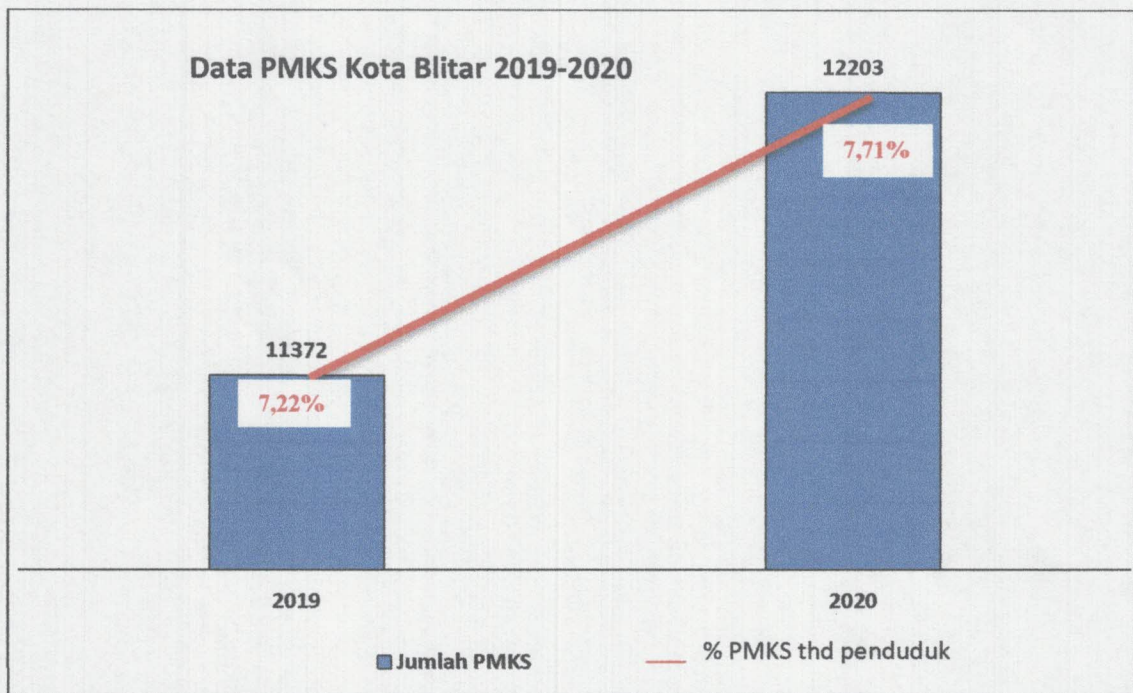
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,00%	1,00%	3,25%	-7,31%

Tabel 3.1.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1,00%	-7,31	-831%

Gambaran data PMKS Kota Blitar serta persentase terhadap penduduk tahun 2019 dan tahun 2020 disajikan pada grafik dibawah ini :



Dari grafik diatas diketahui jumlah PMKS tahun 2020 naik sebesar 7,31% dibandingkan tahun 2019. Jumlah PMKS tahun 2019 sebanyak 11.372 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 12.203 jiwa. Target kinerja persentase penurunan PMKS tahun 2020 sebesar 1% dengan realisasi (-7,31%) dan capaian kinerja (-831%), sehingga dikategorikan **TIDAK TERCAPAI**, karena jumlah PMKS tidak turun justru malah naik. Sedangkan

persentase jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk naik dari 7,20% di tahun 2019 menjadi 7,71% di tahun 2020.

Pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dampaknya dirasakan hampir di seluruh sendi kehidupan termasuk sektor sosial ekonomi. Hal ini tentu saja juga berpengaruh terhadap keberadaan PMKS di Kota Blitar. Dari 26 jenis PMKS kenaikan jumlah PMKS terdapat pada kelompok anak dengan kedisabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lansia terlantar, korban bencana alam, korban bencana sosial dan kenaikan terbesar adalah kelompok fakir miskin.

Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS yang berkelanjutan berkelanjutan merupakan salah satu pilihan strategi dalam rangka menghadapi dampak sosial ekonomi selama maupun pasca pandemic, utamanya bagi kelompok marginal dalam hal ini PMKS.

## 2. Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS

**Indikator : Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial**

Pada indikator ini PMKS yang dijadikan variabel perhitungan capaian kinerja adalah Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial dan Orang Terlantar.

Pencapaian sasaran ini dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.1**  
**Pencapaian Kinerja 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90%	92,30%	102,56%

**Tabel 3.2.2**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan 2020**

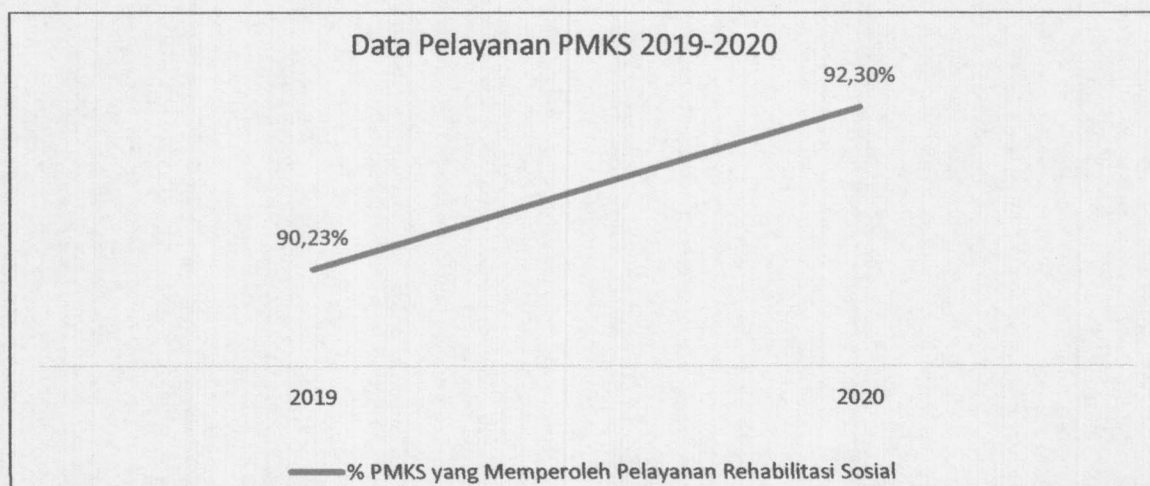
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	85%	90%	90,23%	92,30%

**Tabel 3.2.3**

**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90,00%	92,30%	102,56%

Perkembangan data pelayanan rehabilitasi sosial tahun 2019-2020 digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Pada tahun 2020 jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 11.263 jiwa, sedangkan jumlah PMKS tercatat 12.203 jiwa. Dari target 90% terealisasi 92,30% dengan capaian kinerja sebesar 102,56 sehingga dikategorikan **TERCAPAI**. Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa persentase pelayanan rehabilitasi sosial tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019.

### 3. Sasaran III : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

**Indikator :** a. Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Persentase fakir miskin yang mandiri

Pencapaian sasaran kerjanya dijelaskan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.1**  
**Pencapaian Kinerja 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100,00%	100,00%
	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	18,18	181,80%

**Tabel 3.3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2019 dan 2020**

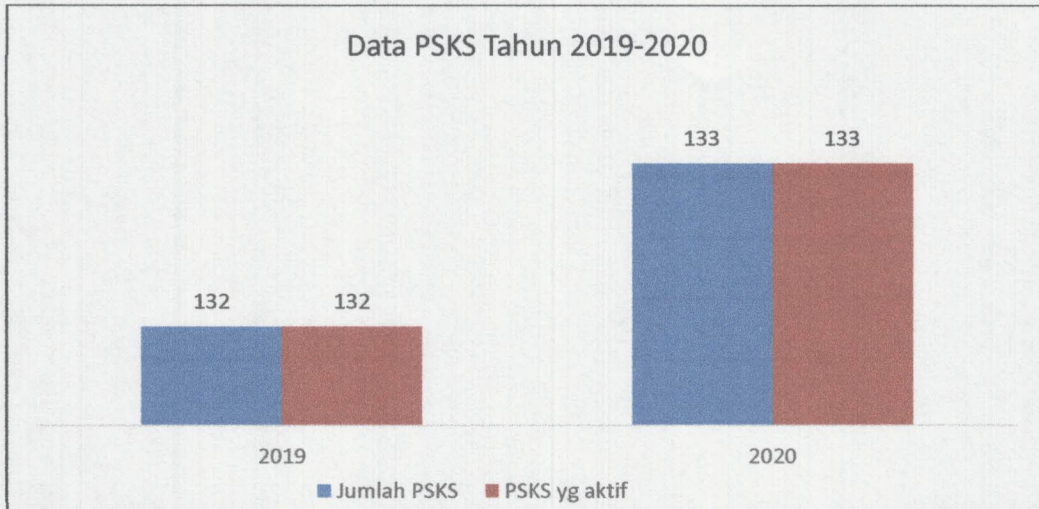
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	99%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
		2019	2020	2019	2020
Sosial Masyarakat	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	10%	18,07%	18,18%

**Tabel 3.3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2020	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100,00%	100,00%	100%
	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	18,18	181,80%

Indikator pertama dari kinerja utama III ini adalah persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, indikator kinerja Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tercapai sebesar 100% baik di tahun 2019 maupun tahun 2020, sehingga dikategorikan **TERCAPAI**. Namun demikian keberadaan PSKS secara kuantitas belum ada peningkatan yang signifikan karena sifatnya sosial sehingga peran sosialnya kurang diminati. Adapun data perkembangan jumlah PSKS dan PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersaji pada grafik berikut :



Indikator kedua pada kinerja utama III ini yaitu persentase fakir miskin yang mandiri. Indikator ini dicapai dengan cara membandingkan jumlah peserta pelatihan yang sudah bekerja/merintis usaha dengan jumlah peserta pelatihan pada tahun sebelumnya. Dari jumlah peserta pelatihan tahun 2019 sebanyak 132 orang, terdata sebanyak 24 orang yang telah mulai merintis usaha mandiri. Dari target 10% terealisasi sebesar 18,18%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 181,80%, katagori **TERCAPAI**. Perbandingan capaian kinerja persentase fakir miskin yang mandiri tahun 2019 dan 2020 disajikan sebagaimana grafik berikut :





#### 4. Realisasi Kinerja berdasarkan Target Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kota Blitar juga mengemban amanah dalam pencapaian SPM layanan dasar urusan sosial. Realisasi kinerja Dinas Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2020 terhadap capaian SPM urusan sosial sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pencapaian Kinerja 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$(\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti} / \text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}) \times 100\%$	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase (%) anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$(\text{Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti} / \text{Populasi Anak Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti}) \times 100\%$	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Persentase (%) lanjut usia terlanjar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	(Jumlah Lansia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti/Populasi Lansia Telantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti)x100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	(Jumlah Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti/Populasi Gepeng di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti)x100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kab/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	(Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota)x 100%	100%	100%

## B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan, dalam laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap belanja langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan. Pengukuran kinerja keuangan per tujuan dan/atau sasaran yang menjadi kinerja utama (cost per outcome) pada Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2020 sebagai berikut :

### 1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	17.823.573.700,00	87,01%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	845.666.150,00	4,13%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.535.764.500,00	7,50%
		Persentasi fakir miskin yang mandiri	278.634.000,00	1,36%
		Jumlah	20.483.638.350,00	100,00%

### 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	1%	-7,31%	-831%	17.823.573.700	17.493.879.375	98,15%

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar ) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi social	90%	92,30%	102,56%	845.666.150	824.412.750	97,49%
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	1.535.764.500	1.504.245.600	97,95%
	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	18,07%	180,7%	278.634.000	273.731.500	98,24%
	JUMLAH				20.483.638.350	20.096.269.225	98,11%

### 3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pemerataan dan kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS	-831,00%	98,15%	-9,47
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi PMKS	Persentase PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	102,56%	97,49%	1,05
3	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	97,95%	1,02

No	Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		Persentase Fakir Miskin yang mandiri	181,80%	98,24%	1,85

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Blitar atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2020. Secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai rencana kerja dan jadwal yang disusun. Adapun tingkat capaian dari 3 kinerja utama dengan 4 indikator kinerja sebanyak 3 indikator TERCAPAI dan 1 indikator TIDAK TERCAPAI. Sedangkan capaian dari masing-masing kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Persentase penurunan PMKS	1%	-7,31	-831,00%	Tidak Tercapai
2.	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90%	92,30	102,56%	Tercapai
3.	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100,00%	Tercapai
4.	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	18,18%	181,80%	Tercapai

### B. LANGKAH PERBAIKAN.

Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mencapai target kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan perlindungan dan pemberian jaminan sosial bagi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang berkelanjutan.
2. Komitmen pimpinan untuk mengatasi masalah PMKS perlu dukungan, kerja sama dan sinergitas program antar OPD, pemerintah provinsi dan pusat serta melibatkan peran dunia usaha melalui CSR.
3. Peningkatan pengelolaan pemanfaatan shelter PMKS sebagai tempat penampungan sementara bagi PMKS terlantar sebelum mendapatkan rehabilitasi sosial di panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial/yayasan/lembaga lainnya.
4. Peningkatan kemampuan/kapasitas sumber daya baik ASN maupun PSKS melalui Bimtek/Diklat pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Blitar, 26 Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA BLITAR



**Drs. Priyo Istanto**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620118 199003 1 009

Lampiran I LKJP  
**MATRIK KENCARA STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**  
**TAHUN 2016 - 2021**

Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021  
 Misi : Meningkatkan kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Perwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan										Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket	
Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Awal							Formula Perhitungan	Indikator	Uraian	Indikator	Formula Perhitungan	Tingkat								Program
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1 Meningkatkan Pemerataan dan Kesejahteraan	2 Indeks Gini	3 Rumus Kalkulator Indeks Gini	4 0,36	5 0,41	6 0,36	7 0,36	8 0,36	9 0,36	10 0,36	11 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	12 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$(N-1) - N$  $N - 1$  Ket : N : Jmlh PMKS tahun ini N-1 : Jmlh PMKS tahun kemarin	13 $(N-1) - N$  $N - 1$  $\text{_____} \times 100\%$	14 84	15 85	16 86	17 87	18 88	19 89	20 90	21 91	22 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	23
			82,35%	82,29%	82%	82%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		
2 Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelompok Sosial Masyarakat	3 Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4 Rumus Kalkulator Indeks Gini	5 85%	6 95%	7 98%	8 98%	9 98%	10 98%	11 98%	12 Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	13 Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	$\text{_____} \times 100\%$  Jumlah PMKS	14 82,35%	15 82,29%	16 82%	17 82%	18 85%	19 85%	20 85%	21 85%	22 85%	23 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan daerah	24
			85%	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%		
3 Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelompok Sosial Masyarakat	4 Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	5 Rumus Kalkulator Indeks Gini	6 85%	7 95%	8 98%	9 98%	10 98%	11 98%	12 98%	13 Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelompok Sosial Masyarakat	14 Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\text{_____} \times 100\%$  Jumlah PSKS x 100%	15 85%	16 95%	17 98%	18 98%	19 98%	20 98%	21 98%	22 98%	23 98%	24 Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	25
			85%	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%		
4 Meningkatkan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelompok Sosial Masyarakat	5 Persentase fakir miskin yang mandiri	6 Rumus Kalkulator Indeks Gini	7 10%	8 10%	9 10%	10 10%	11 10%	12 10%	13 10%	14 Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelompok Sosial Masyarakat	15 Persentase fakir miskin yang mandiri	$\text{_____} \times 100\%$  Jumlah fakir miskin yang dilatih yang sudah bekerja/berusaha  $\text{_____} \times 100\%$  Jumlah fakir miskin yang dilatih	16 10%	17 10%	18 10%	19 10%	20 10%	21 10%	22 10%	23 10%	24 10%	25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)	26
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		





Lampiran II LKjIP  
 RENCANA KINERJA TAHUN 2020  
 DINAS SOSIAL KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN	
1 Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	2 Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	3 1%	4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5 Persentase warga miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	6 100%	7 Kegiatan Jaminan Sosial bagi Warga Miskin	8 Jumlah Peserta Pembinaan PKH	9 3084 org	10	
							Jumlah Warga Miskin yang Sakit / mendapat musibah lainnya yang mendapatkan bantuan sembako	50 org		
							Jumlah dokumen data hasil verifikasi dan validasi data peserta PBLJKN dan BDT	2 dok		
							Jumlah Warga Miskin yang mendapat tambahan kesejahteraan	11165 org		
							Jumlah Warga Miskin yang menerima bantuan beras	11165 org		
							Jumlah pelayanan Surat Pernyataan Miskin bagi warga miskin	1000 SPM		
							Jumlah dokumen monev dan pelaporan kegiatan Pelayanan Jaminan Sosial bagi Warga Miskin	1 dok		
							Jumlah peserta kegiatan Tagana Goes to School Tagana Masuk Sekolah	300 org		
							Jumlah Tagana yang mendapatkan tambahan kesejahteraan	32 org		
							Jumlah peserta pembinaan anggota Tagana dan kegiatan ketangapdaruratan	132 org		
							Jumlah peserta Bimtek Relawan Kebencanaan	59 org		
							Jumlah Pemeliharaan sarpras lapangan untuk siaga bencana	2 unit		
							Jumlah peserta HUT Tagana	110 org		
							Jumlah ketersediaan bufferstock untuk penanganan pasca bencana	30 paket		

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	90%	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial	85%	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya	Jumlah dokumen money dan pelaporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Keluarga Rentan	5 dok	
							Jumlah PMKS (psikotik/eks psikotik/terlantar) yang mendapatkan fasilitas rujuk ke RSJ atau mendapat perawatan lanjutan ke pusat (rehabilitasi/panti/yayasan/pondok)	5 org	
							Jumlah fasilitas PMKS/terlantar selama pengobatan/perawatan di Rumah Sakit/panti/ pondok/yayasan	5 org	
							Jumlah dokumen pendataan PMKS	1 dok	
							Jumlah klien hasil razia/ penjangkaran Gepeng/PMKS lainnya yang dibina	20 org	
							Jumlah psikotik bebas pasung	3 org	
							Jumlah peserta pelatihan penanganan psikotik dengan praktek penggunaan baju restrain	50 org	
							Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan sosial	356 org	
							Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas	120 org	
							Jumlah dokumen money dan pelaporan Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan PMKS Lainnya	1 dok	
						Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia	Jumlah anak SD bermasalah sosial yang mengikuti Tetrah di PSPA Batu	50 org	
							Jumlah fasilitas adopsi anak	3 org	
							Jumlah pelayanan pemulangan anak/orang terlantar ke daerah asal	30 org	
							Jumlah Lansia yang mengikuti peringatan HLUN	0 org	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	% PSKS yang terampil dalam pelayanan kesejahteraan sosial	77%	Pemberdayaan, Peningkatan Jejaring PSKS dan Pembinaan Kepahlawanan Keperintisan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas Lansia	1.000 org	
							Jumlah bantuan pendampingan perlindungan hukum bagi anak bermasalah sosial	10 org	
							Jumlah Lansia terlantar dan PMKS Lainnya yang mendapat pelayanan sosial	970 org	
							Jumlah dokumen monev dan pelaporan kegiatan Pelayanan Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia	1 dok	
							Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya	1 unit	
							Jumlah peserta peringatan HUT PETA	1.000 org	
							Jumlah peringatan hari Pahlawan	1 prngt	
							Jumlah Perintis/janda perintis kemerdekaan yang menerima tali asih dan bingkisan Lebaran	5 org	
							Jumlah Pertuni, PWRI, Pepabri, Veteran, DHC 45 dan PSKS yang menerima tambahan kesejahteraan	365 org	
							Jumlah PSKS yang mengikuti kegiatan peningkatan jejaring dan keterampilan/pengetahuan guna peningkatan pelayanan PMKS	76 org	
							Jumlah dokumen Money dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan, Peningkatan Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pembinaan Kepahlawanan Keperintisan	1 dok	
							Jumlah anak yatim/piatu yang difasilitasi mendapatkan bantuan	494 org	
							Jumlah peserta workshop kewirausahaan bagi fakir miskin	117 org	
							Jumlah KUBE yang dibentuk dan dibina	1 KUBE	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah dokumen hasil verifikasi dan validasi data fakir miskin	1 dok	
							Jumlah dokumen Monev dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	1 dok	
						Pembinaan Modin Kematian dan Juru Kunci Makam	Jumlah Juru Kunci Makam dan modin kematian yang dibina	312 org	
							Jumlah peserta pelatihan merawat jenazah	145 org	
							Jumlah dokumen monev dan pelaporan kegiatan Pembinaan Modin Kematian dan Juru Kunci Makam	1 dok	
	Persentase fakir miskin yang mandiri	10%	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG SOSIAL)	% PMKS Terlatih	35%	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat di bidang sosial	Jumlah PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	40 org	
							Jumlah dokumen monev dan pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat di Bidang Sosial	1 dok	



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

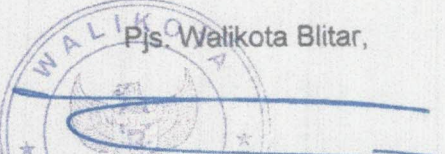
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Ec. PRIYO INSTANTO  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Blitar  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dr. Ir. JUMADI, M.MT  
Jabatan : Pjs. Walikota Blitar  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

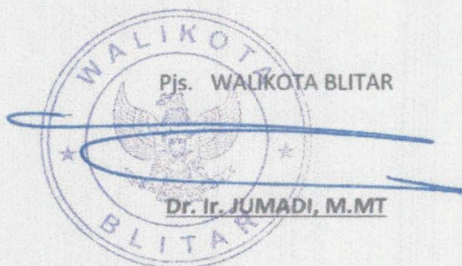
Pjs. Walikota Blitar,  
  
**Dr. Ir. JUMADI, M.MT**

Blitar, 23 Oktober 2020  
Kepala Dinas Sosial  
Kota Blitar,  
  
**Drs. Ec. PRIYO INSTANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620118 199003 1 009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS SOSIAL KOTA BLITAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemerataan dan Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	1%
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (yang terdiri dari Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar ) yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial	90%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
		Persentase Fakir Miskin Yang Mandiri	10%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Perkantoran	896.935.811,00	DID, DAU, Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov Jatim
2	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	49.310.300,00	DAU, DID
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.990.000,00	DID
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.823.573.700,00	DAU, Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov Jatim
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah	845.666.150,00	DAU, DID
6	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	1.535.764.500,00	DAU
7	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)	278.634.000,00	DBHCHT (Spesifik Grant)
<b>JUMLAH</b>		<b>21.434.874.461,00</b>	



LAMPIRAN IV LKJIP  
PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Bitar  
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	$(N-1) - N$ $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ N - 1 Ket : N : Jmlh PMKS tahun ini N - 1 : Jmlh PMKS tahun kemarin	1,00%	-7,31%	-831,00%	Dampak pandemi covid 19 dirasakan pada berbagai sektor kehidupan termasuk dampak sosial ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah fakir miskin sehingga diperlukan strategi guna penanganan fakir miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.823.573.700,00	17.493.879.375,00	98,15%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS	Persentase (%) PMKS (Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Jumlah yang sudah dilayani $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Jumlah PMKS	90,00%	92,30%	102,56%		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan daerah	845.666.150,00	824.412.750,00	97,49%	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase fakir miskin yang mandiri	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Jumlah PSKS x 100% Jumlah fakir miskin yang dilatih yang sudah bekerja/berusaha $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Jumlah fakir miskin yang dilatih	100,00%	100,00%	100,00%		Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.535.764.500,00	1.504.245.600,00	97,95%	
				10,00%	18,18%	181,80%		Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT Bidang Sosial)	278.634.000,00	273.731.500,00	98,24%	

